

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aprita, Serlika., 2016, *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga*, Pena Indis, Makassar.
- , 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Pelindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, CV. Pustaka Abadi, Jember.
- Arikunto, Suharsimi., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur., 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Az., Lukman Santoso., dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir., 1999, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi: Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hakim, Endang., dan Hakim, Lukman., 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya., 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati., dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- , 2017, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Kansil, Cst., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Leback, Karen., 2012, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, Nusa Media, Bandung.
- Lontoh, Rudhy A., Kailimang, Denny., dan Ponto, Benny., 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Makarao, Moh. Taufik., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Manik, Edward., 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Mansyur, Ridwan., dan Witanto, D.Y., 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta.
- Manulang, Fernando M., 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mas, Marwan., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno., 1998, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muljadi, Kartini., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*, Alumni, Bandung.

- Mulyadi, Lilik., 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Mustofa, Wildan Suyuti., 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nasir, Muhammad., 2005, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono., 1959, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Vorkink-Van Hoeve, Bandung.
- Putro, Widodo Dwi., 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasaid, M. Nur., 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rastuti, Tuti., 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung., 1977, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Rifai, Ahmad., 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rubini dan Ali, Chaidar., 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Sadino, Octarid., 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sanjaya, Umar Haris., 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Gama Media Printing, Yogyakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu., 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- Sastrawidjaja, Man S., 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Siregar, Bismar., 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeparmono, R., 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso, R., 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi., 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Sinaga, Syamsuddin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soeyono dan Adilah, Siti Ummu., 2003, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Univesitas Sultan Agung*, Semarang.
- Sugeng, Bambang., dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suyatno, R. Anton., 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Suyudi, Aria., Nugroho, Eryanto., dan Nurbayanti, Herni Sri., 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Syahrani, Riduan., 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Garuda Metropolitan, Jakarta.

- Tutik, Titik Triwulan., 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Utrecht, E., 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Usman, Rachmadi., 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Wicaksana, Dio Ashar., et. All., 2020, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan., 2009, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit: Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor, dan Kreditor, Penyebab Perusahaanaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Wijayanta, Tata., 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yahanan, Annalisa., 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, UNSRI, Palembang.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan., 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal

- Aditya, Tjokorda Agung Candra., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Dharmasisya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Vol. 1, No. 3, hlm. 1549-1558.
- Afriana, Anita., 2017, “Mediasi *In Court* Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Win-Win Solution”, *Jurnal Akta Yudisia*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-20.
- Casanova, Febri Yanti., 2018, “Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Pactum Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Vol. 1, No. 2, hlm. 90-98.

- Dewanto, Pandu., 2020, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Vol. 5, No. 2, hlm. 303-324.
- Hadi, Syofyan., dan Michael, Tomy., 2017, “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Vol. 5, No. 2, hlm. 383-400.
- Harsono, Ivan., dan Prananingtyas, Paramita., 2019, “Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 12, No. 2, hlm. 1067-1088.
- Helmi, Muhammad., 2020, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 22, No. 1, hlm. 111-132.
- Irianto, Catur., 2015, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bogor, Vol. 4, No. 3, hlm. 399-418.
- Isnantiana, Nur Iftitah., 2017, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Islamadina*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Vol. 28, No. 2, hlm. 41-56.
- Julyano, Mario., dan Sulistyawan, Aditya Yuli., 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Credipo*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 1, No. 1, hlm. 13-22.
- Nugroho, Dedy Muchti., 2015, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Vol. 10, No. 1, hlm. 9-25.
- Purba, Maranatha., 2019, “Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit: Studi Putusan Mahkamah Agung No.137K/Pdt.Sus-PKPU/2014”, *USU Law*

*Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 7, No. 2, hlm. 138-148.

Rifani, Ratu Alawiyah., Fauziah, dan Fahrudin, Muhammad., 2021, “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”, *Jurnal Jurisdictie*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jakarta, Vol, 3, No. 2, hlm. 146-161.

Silalahi, Udin., dan Tanjung, Beatrix., 2021, “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi”, *Jurnal Hukum Undang*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Muaro Jambi, Vol. 4, No. 2, hlm. 371-401.

Tambunan, David., Habeahan, Besty., dan Silaen, August., 2018, “Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang”, *PATIK: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Vol. 7, No. 2, hlm. 112-122.

Wantu, Fence M., 2007, “Antinomi Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 19, No. 3, hlm. 335-485.

Wijayanta, Tata., 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 14, No. 2, hlm. 216-226.

Wijayanta, Tata., 2014, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 26, No. 1, hlm. 1-13.

Wijayanta, Tata., 2018, “Deadline Settlement Of Petition For Declaration Of Bankruptcy Before The Commercial Court And The Legal Consequences According To Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Debt Payment Obligations”, *Jurnal Yusticia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 7, No. 3, hlm. 519-533.

Ziyad, Ahmad., dan Tien, Mas Anienda., 2021, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya”, *Journal Banua Law Review*,

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Vol. 3, No. 2, hlm. 152-161.

### **C. Website**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [15/12/2021], <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17869>, [25/05/23].

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [18/10/2021], <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17698>, [25/03/23].

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, [https://www.ojk.go.id/id/faq.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20adalah,madal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan](https://www.ojk.go.id/id/faq.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20adalah,madal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan), [03/03/23].

Tambunan Simamora Law Firm, <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/>, [09/01/2023].

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).